

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. (Arum, 2012)

Sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Prof. Dr. P. J. A. Andriani) dalam (Kangtoshi, 2010).

Fungsi pajak sebagai *Budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi *Reguler*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri. (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8) dalam (Fery Dwi Prasetyo, 2006).

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi

pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. (Widayati, Nurlis 2010).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. (Widayati, Nurlis 2010).

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu

merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. (Widayati, Nurlis 2010).

Gozali (1976) dalam Handayani mendefinisikan kesadaran sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. (Sudjana 2006) dalam Handayani. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penelitian ini mengacu pada Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi

yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan menambahkan satu variabel independen yaitu Kualitas Layanan terhadap wajib pajak, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Variabel kualitas layanan terhadap wajib pajak ini merupakan salah satu variable dari penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Dari gambaran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan mendalam sebagai alat untuk menguji kebenaran. Maka dari itu penelitian ini diberi judul FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BOYOLALI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
- b. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
- c. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

- d. Apakah kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
- c. Menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
- d. Menguji pengaruh kualitas layanan terhadap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti

Memberikan Pengetahuan yang lebih kepada peneliti mengenai pajak penghasilan dan perilaku wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak penghasilan.

2. Bagi Aparat Pajak (Fiskus)

Diharapkan menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Boyolali dalam usaha peningkatan pelayanan prima terhadap wajib pajak agar dapat menarik kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang melandasi penelitian yaitu tentang *pajak*, teori atribusi (*Atribution Theory*), *kesadaran membayar pajak*, *pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan*, *persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan*, *kualitas layanan terhadap wajib pajak*, *kemauan membayar pajak* dan yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi

Jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variable dan pengukurannya, serta analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data yang meliputi prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.